

Pengaruh *Good Public Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau)

Sepriani¹, Arini^{2*}, Gusmarila Eka Putri³

^{1,2*,3} Universitas Lancang Kuning, Program Studi Akuntansi, Pekanbaru, Riau, 28265, Indonesia

¹seprianiria85@gmail.com, ²arini@unilak.com, ³gusmarilaputri@unilak.ac.id

Abstract

This research aims to find out and test whether Good Public Governance and the Government's Internal Control System influence the Quality of Financial Reports in Regional Apparatus Organizations in Riau Province. This research used a sample of 90 respondents using a non-probability sampling technique, namely Purposive Sampling. The method used in this research is a quantitative method. The data collection techniques used in this research are Questionnaires. The research method used in this research is multiple linear regression, with the help of SPSS 26. The results of this research show that good public governance (X^1) and the government's internal control system (X^2) influence the quality of financial reports (Y). The better the implementation of good public governance, the better the quality of financial reports. Implementing the government's internal control system will have an impact on improving the quality of financial reports.

Keywords: *Quality of Financial Reports, Good Public Governance, Government Control Internal System,*

1. Pendahuluan

Dalam waktu yang relatif singkat Akuntansi Sektor Publik semakin berkembang pesat, dimana Akuntansi Sektor Publik digunakan sebagai alat informasi untuk Pemerintah sebagai manajemen ataupun alat informasi untuk publik. Sektor publik menurut sudut pandang ekonomi merupakan suatu entitas yang kegiatannya berkaitan dengan usaha untuk memperoleh barang serta pelayanan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Salah satu lembaga sektor publik yang mendapat perhatian Akuntansi lebih besar yaitu di lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus bertanggungjawab atas aktivitas dan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Jufri et al., 2019).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, akuntabilitas dan transparansi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki informasi keuangan yang tidak menyesatkan, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat dibandingkan guna untuk

mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya kualitas laporan keuangan yaitu *Good Publik Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Good Publik Governance merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel.

Permasalahan yang ditemukan oleh BPK pada Pemerintah OPD Provinsi Riau terkait *Good Public Governance* (GPG) adalah ditemukannya permasalahan ketidakpatuhan LKPD, secara konsep *Good Public Governance* (GPG) kurang efektif dan efisiennya kinerja pemerintah sehingga terjadi ketidakpatuhan pada aparatur pemerintah daerah yang mengakibatkan kerugian. Negara mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 2.457,24 miliar dikarenakan tidak efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan *Good Public Governance* (GPG) sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di mana hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Good Public Governance* (GPG) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Anas, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aminy et al. (2021) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh dalam penerapan *Good Public Governance* (GPG) terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja.

Berdasarkan laporan IHPS semester I 2024 oleh BPK RI atas LKPD, BPK mengumumkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 493 (90,3%) LKPD dan untuk pemerintah daerah Provinsi Riau sendiri BPK memberikan opini WTP. Namun, selain memberikan opini BPK juga mendapatkan temuan berupa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan,

meski tidak mempengaruhi opini. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 834 permasalahan, Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 422 permasalahan dan Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan sebanyak 317 permasalahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Liziana dan Sutrisno, 2017), menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. yang dimana jika sistem pengendalian internal semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian tidak sejalan yang dilakukan oleh Hamruna et al. (2022), (Gustina: 2021) dan (Ardianto dan Eforis: 2019) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Telaah Literatur Dan Perumusan

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No.71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan sesama pengguna laporan keuangan pemerintah. Menurut (Mulyadi, 2015:36), Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya sistem akuntansi dan kompetensi staf akuntansi yang berjalan baik. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan

yang memiliki kualitas informasi yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan.

Menurut Defitri (2016:21) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut Hans (2016:71) berpendapat bahwa kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan.

2.2 Good Public Governance

Jika pada sektor privat (swasta atau dunia usaha) kita mengenal istilah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan, maka pada sektor publik ada *public governance* atau yang dikenal dengan istilah *government governance* (tata kelola pemerintahan). Menurut (Gunawan, 2021) *Good Public Governance* (GPG) merupakan pendekatan manajemen secara menyeluruh dimana para petinggi dalam organisasi mengarahkan dan mengontrol seluruh organisasi, memanfaatkan kombinasi informasi manajemen dan struktur pengendalian manajemen yang hierarkis.

Menurut Pedoman umum *Good Public Governance* (GPG) yang diterbitkan oleh

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia tahun 2008 menjelaskan bahwa *Good Public Governance* (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. *Good Public Governance* (GPG) bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan *country rating*, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi.

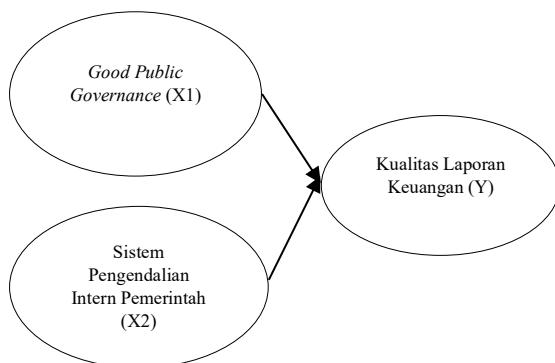
Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa tata kelola (*governance*) di sektor publik merupakan sistem yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan sebuah organisasi publik untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggungjawab dengan akuntabel.

2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Perkembangan pengendalian intern di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan, konsep pengendalian sebagai suatu proses bgeser dari *hard factor* ke *soft factor*. PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, perlu adanya pengendalian intern dimana pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pengaruh kualitas informasi laporan keuangan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

3. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Riau, dimana OPD merupakan tata laksana dari program-program yang dikeluarkan ataupun yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan di setiap OPD yang terlibat langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Sampel yang diambil dari tiap OPD adalah 1 Kasubag/Ketua Tim, 1 Bendahara dan 1 Tenaga Akuntansi, sehingga dari 30 OPD tersebut diambil 3 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 90 orang.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Skala penelitian yang digunakan adalah Skala Likert. Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Untuk mengukur variabel diatas digunakan Skala Likert sebanyak lima tingkat.

Tabel 1. Identifikasi dan Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Relevan • Handal • Dapat dipahami • Dapat dibandingkan
Good Public Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Partisipatif • Akuntabel • Value of Money
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko • Kegiatan Pengendalian

- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Kualitas Laporan Keuangan	KL1	0,668	0,207	Valid
	KL2	0,474	0,207	Valid
	KL3	0,491	0,207	Valid
	KL4	0,586	0,207	Valid
	KL5	0,643	0,207	Valid
	KL6	0,566	0,207	Valid
	KL7	0,520	0,207	Valid
	KL8	0,423	0,207	Valid
	KL9	0,587	0,207	Valid
	KL10	0,584	0,207	Valid
	KL11	0,649	0,207	Valid
	KL12	0,457	0,207	Valid
Good Public Governance	GG1	0,428	0,207	Valid
	GG2	0,624	0,207	Valid
	GG3	0,696	0,207	Valid
	GG4	0,424	0,207	Valid
	GG5	0,517	0,207	Valid
	GG6	0,500	0,207	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SPI1	0,555	0,207	Valid
	SPI2	0,583	0,207	Valid
	SPI3	0,683	0,207	Valid
	SPI4	0,653	0,207	Valid
	SPI5	0,734	0,207	Valid
	SPI6	0,756	0,207	Valid
	SPI7	0,646	0,207	Valid
	SPI8	0,704	0,207	Valid
	SPI9	0,537	0,207	Valid
	SPI10	0,785	0,207	Valid
	SPI11	0,830	0,207	Valid
	SPI12	0,782	0,207	Valid
	SPI13	0,734	0,207	Valid
	SPI14	0,668	0,207	Valid
	SPI15	0,694	0,207	Valid

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa diketahui nilai r hitung seluruh item pernyataan variabel $> 0,207$. Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

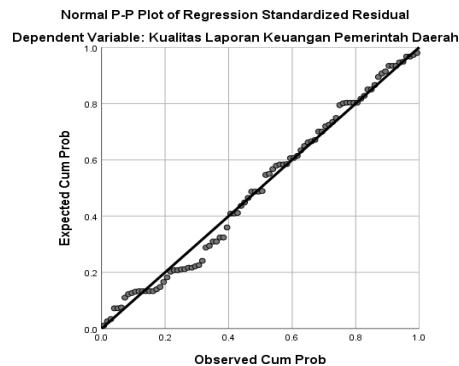
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,6	0,737	Reliabel
2	Good Public Governance	0,6	0,909	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,6	0,847	Reliabel

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Dari Tabel 3 diatas dapat diketahui nilai reliabilitas seluruh variabel $\geq 0,6$, Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau dapat dipercaya.

4.1.3 Hasil Uji Normalitas Data



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Normal Probability P-Plot

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat grafik Normal Probability P-Plot. Dari gambar diatas terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal. Berdasarnya gambar tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

4.1.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Collinearity Statistics

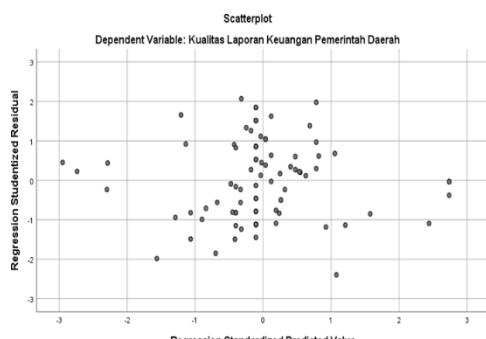
Model	Tolerance	VIF
1 (Constan)		
Good Public Governance	0.539	1.854
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.539	1.854

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Berdasarkan Tabel 4 diatas diketahui nilai variance inflation factor (VIF) sebesar $1,854 < 10$ dan tolerance sebesar $0,539 > 0,10$. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Scatterplot

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Berdasarkan Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

4.1.6 Hasil Uji Koefisien Regresi

Tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standar Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constan)	16.582	3.769		4.399	.000
Good Public Governance	0.906	0.192	0.485	4.731	.000

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.218	0.078	0.287	2.798	.006
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KLKPD} = 16,582 + 0,906 \text{ GPG} + 0,218 \text{ SPIP}$$

4.1.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

(Adjusted R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.712 ^a	0.507	0.495	3.05524

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Public Governance

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data SPSS 26 (2025)

Dari Tabel 6 diatas diperoleh nilai R^2 sebesar 0,495 atau 49,5%. Artinya adalah bahwa sebesar 49,5% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Good Public Governance (GPG) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Good Public Governance (GPG) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Provinsi Riau

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa nilai t hitung ($4,731 > 1,988$) atau signifikansi ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adalah bahwa Good Public Governance (GPG) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada para stakeholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat

yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Adanya *good public governance*, pemerintah yang bertindak sebagai agen yang diberi kewenangan oleh principall diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik dan terbuka kepada publik.

Dengan terciptanya suatu kondisi yang menjamin adanya saling kontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Menurut Reydonnyzar, (2019:62) terdapat beberapa unsur yang dapat membangun dan bersifat saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang ada dalam *good public governance* tersebut adalah Negara atau Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat.

Good Public Governance (GPG) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk memiliki tata kelola yang baik untuk kepentingan masyarakat dan tuntutan lingkungannya. Penerapan *Good Public Governance* (GPG) diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan terbebas dari penyajian data yang belum sesuai dengan peraturan serta terbebas dari praktik KKN.

Konsep *Good Public Governance* (GPG) memperkuat prinsi-prinsip seperti akuntabilitas partisipasi masyarakat dan keadilan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan investor. Oleh karena itu, penerapan *Good public Governance* (GPG) dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal.

Menurut Mahmudi (2016), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntansi sektor publik juga memiliki peran yang strategik yaitu melalui perwujudan transparansi, akuntabilitas dan upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. *Good Public Governance* (GPG) merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu upaya penerapan *Good Public Governance* (GPG) dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. *Good Public Governance* (GPG) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin baik penerapan tata kelola instansi pemerintahan maka akan semakin baik pula suatu laporan keuangan yang akan dihasilkan. Menurut Herawati dan Defi (2017) menyebutkan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas. *Good Public Governance* (GPG) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan serta menjamin terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah. Dengan terlaksananya *Good Public Governance* (GPG) dengan baik maka laporan keuangan pemerintah daerah akan memiliki kualitas yang baik.

Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnnya sebaik-baiknya, memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna kemakmuran masyarakat. Dengan menerapkan karakteristik *good public governance* (GPG) memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pada masyarakat dan pemerintah secara efektif. Dengan adanya

good public governance maka pemerintah diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintah yang baik antara pemerintahan daerah dan para pemakai informasi keuangan pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. *Good public governance* menjadi pedoman bagi instansi pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang diakui oleh masyarakat. Dengan adanya *good public governance*, dapat dibentuk pelaksanaan kinerja yang baik di bagian keuangan sehingga mempermudah dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan informasi krusial diantara berbagai informasi lainnya, sehingga perlu diberikan perhatian serius guna memastikan kualitasnya. Apabila suatu pemerintah berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2020) bahwa *good public governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota ambon. Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh Kusumaningrum (2024) yang mendapatkan bahwa *Good Public Governance* (GPG) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminy et al. (2021) bahwa tidak adanya pengaruh dalam penerapan *Good Public Governance* (GPG) terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU kota/kabupaten Nusa Tenggara Barat.

4.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Provinsi Riau

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa nilai t hitung ($2,798 > t$ tabel $(1,988)$) atau signifikansi $(0,006) < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adalah bahwa Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen. Serta pemanfaatan teknologi informasi sendiri dapat meminimalisasi adanya kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data, dikarenakan aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara sistematis dan pada akhirnya mampu menyajikan laporan keuangan yang handal.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016), sistem pengendalian internal adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang memadai maka berbagai penyimpangan, kecurangan, korupsi dan kesalahan dapat diminimalisir sehingga aset-aset organisasi dapat terlindungi. Selain itu sistem pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berdampak pada kualitas tata kelola organisasi. pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses yang ditempatkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai serta kepastian yang wajar tentang pencapaian operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Adanya sistem pengendalian internal juga dapat mencegah terjadinya

penggelapan atau *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat mengakibatkan terjadi penyimpangan dari laporan keuangan yang dihasilkan tersebut. Dengan sistem pengendalian internal maka pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat mengurangi penyimpangan penyimpangan yang terjadi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan yang baik tidak dapat terlepas dari implementasi pengendalian internal yang efektif. Penerapan sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal keandalan laporan keuangan. Keberadaan pengendalian internal sangat essensial untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Semakin efisien pengendalian internal yang dijalankan, semakin unggul pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak lepas dari penerapan pengendalian internal yang baik.

Sesuai dengan yang ditegaskan dalam pasal 58 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni dikatakan bahwa pengatur dan penyelenggaraan pengendalian intern Pemerintah (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan informasi laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Menurut Surastiani dan Handayani (2015) dan Rohmah et al. (2020) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal salah satu prosedur, kebijakan yang diterapkan guna memberikan arahan atau keyakinan yang memadai bahwa sasaran dan tujuan organisasi sudah dicapai. Pada dasarnya

sistem pengendalian internal merupakan faktor eksternal yang disusun untuk memudahkan pegawai OPD dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian internal yang kurang akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan yang dilaporkan.

Menurut Widari dan Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi serta memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan memantau serta memberikan jaminan serta kepastian yang memadai untuk tercapainya suatu tujuan secara efektif serta efisien dan menyelenggarakan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas maka penyusunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik serta memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2019) yang mendapatkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Sari (2023) bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba et al. (2021) yang mendapatkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan landasan teori diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian skripsi adalah *Good Public Governance* (GPG) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Semakin baik penerapan *Good Public Governance* (GPG) maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik, tujuannya agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sehingga tercipta akuntabilitas public yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik dan sebaliknya, semakin buruk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin buruk.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran diharapkan OPD Provinsi Riau hendaknya dapat menyajikan laporan keuangan yang andal yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dan objektif atau netral. Hal ini dinilai penting karena informasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pimpinan.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga diharapkan dapat mereview penggunaan anggaran belanja yang kurang dimaksimalkan serta dalam kinerja keuangannya dari segi ekonomi harus mempertahankan dan meningkatkan segi ekonomis dengan menghindari pengeluaran

yang tidak produktif. Dalam segi efisiensi dapat dilakukan dengan memperhatikan perencanaan anggaran belanja, dan dalam segi efektivitasnya harus ditingkatkan, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas. Karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau seperti kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan Teknologi Informasi, komitmen organisasi, peran internal audit dan pengawasan keuangan daerah dengan metode dan alat analisis yang berbeda sehingga mendapatkan perspektif lain dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Amalia, R. N. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Skripsi: Jember. Universitas Jember.
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat). Valid: *Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.

- Angelicca, M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). Skripsi: Kalimantan Tengah. Universitas Sanata Dharma.
- Anwar, R. (2021). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Bastian, I. (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Busro. (2018). Organisasi dan Manajemen, Gava Media, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmawan, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Dyah Setyaningrum R. W. and A. S. 2017, Good Public Governance Curruption and Public Service Quality: Indonesia Eviden' International Journal of Applied Budiness and Economic Research, 15(19), pp. 327– 338.
- Enny, I. A., & Adi, N. M. (2016). Pengaruh Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal: Bali*. Universitas Udayana.
- Farhana, A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pengelola aset dan pengendalian intern manajemen aset tetap terhadap keandalan informasi aset tetap pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Jember. Skripsi: Jember. IAIN Jember.
- Gustina, I., (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hamruna, I., Muhammad, Z., & Thaher, R, (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05(10), 739–745.
- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau), *Jurnal Sorot Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i2.10>
- Julita, T. (2023) Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi: Tanjungpinang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.
- Junyantara, I. G. A., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan keuangan Kota

- Denpasar. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 338–358. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1820>
- Mahmudi. (2016). Buku Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo, D. (2018). Akuntansi Sektor Publik (D. Mardiasmo (ed.); Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Marsdenia. (2016). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik Daerah X, Jurnal Of Vocational Program University Indonesia, Volume 4. Nomor 1. Januari – Juni 2016.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan taat kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Priansa, D. J. (2018). Perencanaan dan Pengembangan SDM (A. Garnida (ed.); Cet.3). CV. ALFABETA.
- Purba, S., Nainggolan, A., & Tarigan, S. Y. B. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo). Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 20(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.136>
- Puspitasari., D. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi: Surakarta. UIN Raden Mas Said.
- Rahmasari, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6934/5988>
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). JAKA (Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Auditing), 3(1). <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. <http://eprints.ummi.ac.id/63/>